

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT MISKIN KOTA PEKANBARU MELALUI PENINGKATAN PERAN
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Muhammad Qodri

NPM : 107110018

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2016

ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN KOTA PEKANBARU MELALUI PENINGKATAN PERAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

ABSTRAK

Muhammad Qodri

Kata kunci : Strategi, Pembangunan, Pemberdayaan, dan Masyarakat Miskin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun perumusan masalah penelitian ini adalah : bagaimanakah strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin kota Pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)? Apakah sudah berhasil dengan sangat terlaksana? Metodologi yang digunakan adalah metode pendekatan penelitian kuantitatif yang terdiri dari : tipe penelitian yaitu deskriptif, lokasi penelitian adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru dan 30 koperasi dan 30 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, populasi yang digunakan adalah 30 koperasi dan 30 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 1 (satu) pengurus dari setiap 30 Koperasi, dan 1 (satu) pengurus setiap 30 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, yang ditentukan dengan teknik *random sampling*, jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuisioner dan proses wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen, laporan, dan sumber data lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berada pada kategori **Terlaksana (79,7%)**. Dengan demikian Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang sangat terlaksana, dengan alasan dari pihak pengurus Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah belum maksimalnya peningkatan-peningkatan akses permodalan dan modernisasi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**ANALYSIS OF DEVELOPMENT STRATEGY IN EMPOWERING THE POOR CITY
THROUGH INCREASING ROLE PEKANBARU COOPERATIVE AND MICRO SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES SMEs**

ABSTRACT

Muhammad Qodri

Strategy, Development, Empowerment, and Poor Society.

This study aims to identify and analyze the development strategy in the city of Pekanbaru Empowering the Poor Through Increased Role of Cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises (SMEs). The formulation of the problem of this research is: how is the development strategy in the city of Pekanbaru empowering poor through increased role of cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises (SMEs)? Has it been successful with highly accomplished? The methodology used method of quantitative research approach consisted of: the type of research that is descriptive, the research location is the Department of Cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) Pekanbaru and 30 cooperatives and 30 Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pekanbaru, populations used are 30 cooperatives and 30 Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) in the city of Pekanbaru, the sample used in this study consists of 1 (one) board of every 30 Cooperative, and 1 (one) board every 30 Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pekanbaru, determined by random sampling technique, the type of data used is primary data collected through questionnaires and interview process, as well as secondary data obtained from the document, reports, and other data sources is needed in this study, it is then analyzed descriptively. The results showed that the overall development strategy in Pekanbaru City Empowering the Poor Through Increased Role of Cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) that are in the category of Done (79.7%). Thus the Development Strategy to Empower the Poor In Pekanbaru Through Increased Role of Cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) are less highly accomplished, by reason of the board of Cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises (SMEs) is not maximal increases access to capital and modernization of cooperatives and Micro Small and Medium Enterprises (SMEs).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul “Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Detry Karya, SE, MA, selaku Rektor Universitas Islam Riau (UIR) bersama Bapak T. Rafizal AR, S.Sos., M.Si. Selaku Dekan Fisipol yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan jajaran Dosen pada Jurusan Ilmu Administrasi yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Parjiyana., M.Si selaku dosen pembimbing I dan Bapak La Ode Syarfan, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

4. Karyawan/Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi untuk penyelesaian skripsi ini.
5. Semua pihak khususnya orang tua, saudara, dan kawan-kawan yang telah memberikan perhatian dan dorongan selama pendidikan dan dalam penyelesaian tugas akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta sumbangan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan terdapat kekurangan oleh karena faktor keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Karena sangat diharapkan masukan berupa saran dan kritikan sehat yang bersifat membangun untuk kesempurnaan hasil penelitian penulisan ini. Akhir kata, semoga keikhlasan dari semua pihak yang memberikan doa dan bantuan, bimbingan serta dorongan pada penulis mendapatkan limpahan dan rahmat dari ALLAH SWT, dan skripsi ini ada manfaatnya bagi kita semua, amin.

Pekanbaru, 7 November 2016

Penulis,

Muhammad Qodri

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	23
BAB II : STUDI KEPUSTAAAN DAN KERANGKA PIKIR	25
A. Studi Kepustakaan	25
B. Kerangka Pikir	45
C. Hipotesis	47
D. Konsep Operasional.....	47

E. Operasional Variabel	49
F. Teknik Pengukuran	50

BAB III : METODE PENELITIAN.....53

A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Teknik Penarikan Sampel	56
E. Jenis dan Sumber data.....	57
F. Teknik Pengumpulan data.....	58
G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis.....	59
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	60

BAB IV : DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....61

A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru	61
B. Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.....	63
C. Fungsi dan Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru	64

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....71

A. Identitas Responden	71
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
2. Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	72
3. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	73
B. Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	75

BAB VI : PENUTUP.....88

A. Kesimpulan	88
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN	92
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	95
----------------------	-----------



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I . 1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014.....2
I . 2	Tingkat Pengangguran Kota Pekanbaru Tahun 2008 – 20104
I . 3	Tingkat Pengangguran Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 20145
I . 4	Penduduk Miskin Kota Pekanbaru Dari Tahun 2011 – 201411
I . 5	Perkembangan Jumlah Koperasi Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014.....14
I . 6	Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru Tahun 2011 – 201414
I . 7	Misi Ke-5 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat Dengan Meningkatkan Investasi Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dengan Dukungan Fasilitas Yang Memadai dan Iklim Usaha Yang Kondusif. No. 2.....17
I . 8	Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru Tahun 201519
II . 1	Operasional Variabel Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)50
III . 1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru54

III . 2	Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	60
V. 1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	71
V. 2	Identitas Responden Berdasarkan Umur.....	73
V. 3	Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	74
V. 4	Tanggapan Responden Terhadap Pengembangan Kelembagaan Koperasi	76
V. 5	Tanggapan Responden Terhadap Pengembangan Akses Pelayanan dan Sumber Pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	80
V. 6	Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	84

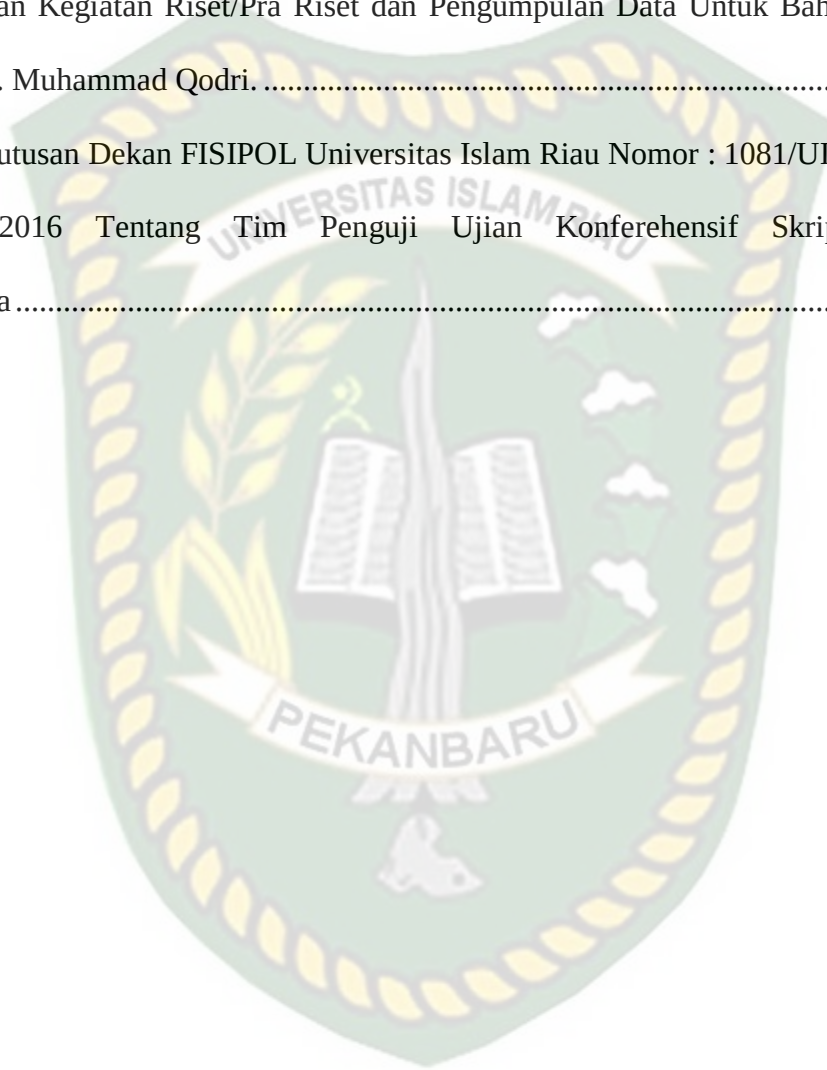
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I . 1	Statistik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2006 – 20143
I . 2	Statistik Pengangguran di Kota Pekanbaru Tahun 2008 – 2014.....5
I . 3	Statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Tahun 2011 – 201516
II . 1	Kerangka Pikir46
IV. 1	Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru 63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner/Angket Penelitian Tentang Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	95
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	101
3. Hasil Rekapitulasi (Daftar Telly) Jawaban Responden Tentang Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	107
4. Foto Dokumentasi Hasil Observasi Penelitian Tentang Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).	109
5. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No: 30/UIR-Fs/Kpts/2016 Tentang : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI an. Muhammad Qodri.	113
6. Surat Rekomendasi Nomor : 503/BP2T/NON IZIN-RISET/1041 Dari Pemerintah Provinsi Riau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tentang	

Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan	
Skripsi an. Muhammad Qodri.	114
7. Surat Rekomendasi Penelitian Nomor : 071/BKBP-REKOM/2016/4021 Dari	
Pemerintah Kota Pekanbaru Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Perihal	
Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan	
Skripsi an. Muhammad Qodri.	115
8. Surat Keputusan Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau Nomor : 1081/UIR-	
FS/KPTS/2016 Tentang Tim Penguji Ujian Konferehensif Skripsi	
Mahasiswa	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur, sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat pula. Proses natural tersebut dapat dilaksanakan jika asumsi-asumsi pembangunan yang ada, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi masyarakat secara penuh. Setiap orang memiliki kemampuan yang sama dan masing-masing pelaku bertindak rasional dapat dipenuhi. Namun demikian, dalam kenyataan asumsi-asumsi tersebut sangat sulit dipenuhi. Pasar sering kali tak mampu memanfaatkan tenaga kerja dan sumber daya alam sedemikian rupa, sehingga tak mampu berada pada kondisi *full employment*. Selain itu produktivitas pelaku ekonomi sangat beragam. Kondisi tersebut diperburuk oleh kenyataan bahwa setiap pelaku ekonomi mendasarkan pasar atas pertimbangan yang rasional dan efisien. Dalam kondisi demikian, pasar atau ekonomi telah terdistorsi. Dalam jangka panjang hal tersebut akan melahirkan masalah pembangunan, seperti kesenjangan, pengangguran dan pada akhirnya kemiskinan, menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007).

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk

yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus di tingkatkan.

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru mengalami peningkatan tiap tahunnya, dan pemerintah pun akan kesulitan untuk memberdayakan masyarakat miskin ini dari tahun ke tahun, dan anggaran untuk membantu masyarakat menengah kebawah juga ikut meningkat dan lowongan pekerjaan yang terbatas. Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2014 :

**Tabel I. 1 : Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014**

No.	Tahun	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	2011	477.151	460.788	937.939
2.	2012	490.339	474.219	964.558
3.	2013	508.961	490.070	999.031
4.	2014	519.515	491.952	1.011.467

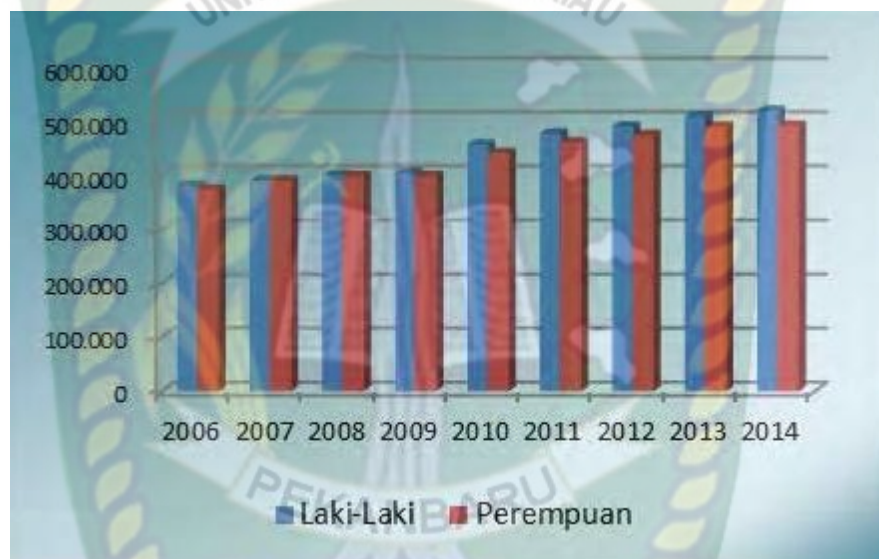
Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2016

Dari tabel I. 1 diatas, jumlah penduduk tahun 2011 sebanyak 937.939 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 964.558 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 26.619 jiwa. Kemudian jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 999.031 jiwa, mengalami

pertambahan sebanyak 34.473 jiwa. Dan jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 1.011.467 jiwa, mengalami pertambahan sebanyak 12.436 jiwa.

Berikut statistik jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kota Pekanbaru dari tahun 2006 – 2014 :

Gambar I. 1 : Statistik Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2006 - 2014



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2016

Ada beberapa masalah pembangunan yang saling berkaitan, yaitu pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran ada karna jumlah populasi yang setiap saat bertambah dengan pesat tanpa ada keseimbangan antara lahan untuk mencari kerja dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah itu. Ada beberapa faktor penyebab pengangguran, yaitu :

1. Besarnya Angkatan Kerja Tidak Seimbang dengan Kesempatan Kerja.
2. Struktur Lapangan Kerja Tidak Seimbang.

3. Kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang.
4. Meningkatnya peranan dan aspirasi Angkatan Kerja Wanita dalam seluruh struktur Angkatan Kerja Indonesia.
5. Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Kerja antar daerah tidak seimbang.

Berikut adalah jumlah pengangguran dari penduduk kota Pekanbaru pada tahun 2008 – 2010 pada tabel berikut :

**Tabel I. 2 : Tingkat Pengangguran
Kota Pekanbaru Tahun 2008 – 2010**

No.	Tahun	Penduduk	Angkatan Kerja (<5 Tahun)			Bekerja	Pengangguran Terbuka
			Laki – laki	Perempuan	Jumlah		
1.	2008	799.213	203.983	109.530	313.513	268.861	44.652
2.	2009	802.788	208.325	115.047	323.372	284.463	38.909
3.	2010	897.768	256.789	178.814	435.603	391.047	44.556

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, 2012

Kemudian dari gambar statistik pengangguran di kota Pekanbaru dari tahun 2008-2012 mengalami penurunan, tetapi dari tahun 2013-2014 statistik pengangguran di kota Pekanbaru mengalami kenaikan yang dapat di lihat pada gambar berikut :

Gambar I. 2 : Statistik Pengangguran di Kota Pekanbaru**Tahun 2008 - 2014**

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, 2016

Kemudian dilihat dari akhir tahun penghitungan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, yaitu pada tahun 2012-2014, tingkat pengangguran kota Pekanbaru juga masih cukup tinggi pada tabel berikut :

**Tabel I. 3 : Tingkat Pengangguran
Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014**

No.	Tahun	Penduduk	Angkatan Kerja (<5 Tahun)			Bekerja	Pengangguran Terbuka
			Laki – laki	Perempuan	Jumlah		
1.	2012	964.558	264.164	144.707	408.871	389.921	18.950
2.	2013	999.031	275.773	165.905	441.678	412.254	29.424
3.	2014	1.011.467	281.339	168.295	449.694	408.331	41.363

Sumber: BPS Kota Pekanbaru, 2016

Pengangguran dan kemiskinan ini merupakan masalah pembangunan juga.

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan mengurus

kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan. Kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak adanya investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota, dan yang lebih parah, kemiskinan menyebabkan jutaan rakyat memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan secara terbatas.

Kemiskinan ditandai oleh kurangnya akses untuk mendapatkan barang, jasa, aset dan peluang penting yang menjadi hak setiap orang. Setiap orang harus bebas dari rasa lapar, harus dapat hidup dalam damai, dan harus mempunyai akses untuk mendapatkan pendidikan dasar dan jasa-jasa layanan kesehatan primer. Keluarga-keluarga miskin butuh mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan cara bekerja dan mendapatkan imbalan secara wajar serta seharusnya mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan terhadap guncangan-guncangan dari luar. Sebagai tambahan, perorangan maupun masyarakat juga miskin dan cenderung terus miskin apabila mereka tidak diberdayakan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.

Mereka tidak punya akses baik akses pengembangan ekonomi maupun akses terhadap kebijakan. Mereka menerima apa adanya. Dampak ini menyebabkan daerah mereka merasa terabaikan dan terisolir. Ketimpangan pembangunan muncul dan berdampak terhadap semakin tertinggalnya perkampungan miskin tersebut.

Dengan pergantian kepemimpinan pun juga tak mampu menekan jumlah masyarakat miskin. Bukannya masyarakat miskin yang terus berkurang malah isu-isu ketimpangan sosial yang justru muncul kepermukaan tak memandang itu di perkotaan maupun di pedesaan. Dewasa ini penggalakan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan, dengan demikian pemberian bantuan kesetiap kecamatan berupa kucuran dana guna mendukung perencanaan masyarakat dalam pengembangan daerahnya dan juga program pemerintah berupa pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di perkotaan. Hal ini belum mampu mengangkat masyarakat marginal dan terpinggirkan dari garis kemiskinan.

Hal ini disebabkan pengangguran merupakan situasi yang disebabkan oleh faktor orang-orang yang bekerja di bawah kapasitas optimalnya (pengangguran terselebung), dan faktor orang-orang yang sebenarnya mampu dan ingin bekerja, akan tetapi tidak mendapat lapangan pekerjaan sama sekali (pengangguran penuh). Untuk itu, upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan melakukan distribusi pendapatan melalui penciptaan lapangan kerja berupah memadai bagi kelompok-kelompok masyarakat yang miskin.

Masyarakat miskin cenderung disingkirkan karena selalu dituduh sebagai penghambat pembangunan dan kemajuan. Tidak semua pembangunan fisik dan spiritual memperhatikan kepentingan masyarakat. Akibatnya, tujuan pembangunan nasional untuk menciptakan atau mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pembukaan UUD 45, hanya terwujud pada sebagian masyarakat atau kelompok yang dekat dengan

pusat kekuasaan tingkat pusat sampai di pelosok-pelosok negeri. Dan paradoksnya adalah, di sana-sini, tercipta komunitas masyarakat tersisih dan tertinggal karena korban pembangunan sebagai si miskin. Menelusuri kemiskinan merupakan sesuatu yang cukup kompleks, ada beberapa catatan yang bisa menjadi acuan tentang kemiskinan terutama di Indonesia, yaitu:

1. Adanya kemiskinan karena angka kelahiran yang tinggi.

Kelompok masyarakat yang tidak maju lebih sering dan cenderung disebut kaum miskin yang sarat dengan kemiskinan. Kemiskinan ini juga selalu mengalami pertumbuhan dengan pesat atau bertambah banyak jumlahnya terutama karena angka kelahiran yang tinggi. Angka kelahiran kaum miskin di negara-negara dunia ketiga termasuk pada wilayah-wilayah tertentu di Indonesia yang tinggi, pada konteks tertentu, tidak seimbang dengan tingkat kematian. Pertumbuhan kemiskinan yang sangat pesat ini terjadi hampir semua lokasi atau tempat mereka berada. Dengan demikian, pada umumnya mereka hampir tidak mempunyai apa-apa selain anak; karena mereka tidak banyak berbuat apa-apa, selain prokreasi dan reproduksi.

2. Mereka tetap miskin karena menutup diri dari pengaruh luar.

Tatanan serta keteraturan suatu komunitas masyarakat di suatu daerah merupakan warisan secara turun-temurun. Dan jika komunitas itu mempunyai kontak dengan yang lain, maka akan terjadi saling meniru kemudian masing-masing mengembangkan hasil tiruan itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Dengan itu, dapat dipahami bahwa hubungan sosial

antar manusia, dan antar masyarakat bersifat mempengaruhi satu sama lain. Namun, tidak menutup kemungkinan, walau terjadi interaksi, ada kelompok atau komunitas yang tidak mengembangkan diri, sehingga tetap berada pola-pola hidup dan kehidupan statis. Akibatnya, mereka tidak mengalami kemajuan yang berarti sehingga mereka tetap dalam keberadaannya yaitu kemiskinan.

Untuk pengentasan kemiskinan, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Sosial RI sejak tahun 1999 telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui pendekatan kelompok yang disebut sebagai kelompok-kelompok usaha. Pendekatan kelompok melalui kelompok usaha merupakan strategi pemberdayaan yang efektif untuk masyarakat lapisan bawah (Sumodiningrat, 1997), hal ini sejalan dengan pendapat (Supriyanto, 1997), yang menyatakan bahwa keberadaan kelompok akan memberikan manfaat lebih besar bagi anggotanya, karena dapat dipakai untuk meningkatkan kemampuan berusaha, mengembangkan pengetahuan dan sistem nilai yang mendukung kehidupan usaha, menyebarkan moralitas usaha yang baik, dan meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih luas seperti usaha, kerumahtanggaan kemasyarakatan dan sebagainya.

Pemerintah menerapkan beberapa program penguatan ekonomi kerakyatan dengan strategi mendorong kemandirian usaha-usaha kelompok masyarakat, sebagai salah satu usaha penanggulangan kemiskinan.

Kemiskinan ini pada dasarnya dipicu oleh rendahnya produktivitas kegiatan masyarakat dengan penyebab kemiskinan yang kompleks dimulai dari kelembagaan ekonomi masyarakat tidak berkembang, sehingga menyulitkan

masyarakat miskin untuk mengakses permodalan, tingkat pendidikan yang tergolong rendah, kondisi sosial budaya yang kurang mendukung, penyebab agensia seperti penguasaan lahan dan ekonomi yang begitu besar oleh beberapa perusahaan serta infrastruktur akses jalan dan pasar yang menyebabkan masyarakat menjadi hidup terpencil dan sulit melakukan kegiatan ekonomi.

Dengan pergantian kepemimpinan pun juga tak mampu menekan jumlah masyarakat miskin. Bukannya masyarakat miskin yang terus berkurang malah isu-isu ketimpangan sosial yang justru muncul kepermukaan tak memandang itu di perkotaan maupun di pedesaan. Dewasa ini penggalakan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat terus dilaksanakan, dengan demikian pemberian bantuan kesetiap kecamatan berupa kucuran dana guna mendukung perencanaan masyarakat dalam pengembangan daerahnya dan juga program pemerintah berupa pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan di perkotaan. Hal ini belum mampu mengangkat masyarakat marginal dan terpinggirkan dari garis kemiskinan.

Penduduk miskin di Kota Pekanbaru mengalami penurunan tiap tahunnya, walaupun mengalami penurunan tiap tahunnya, tetapi penduduk miskin Kota Pekanbaru masih cukup tinggi. Berikut Penduduk Miskin Kota Pekanbaru dari tahun 2011-2014 :

Tabel I. 4 : Penduduk Miskin**Kota Pekanbaru Dari Tahun 2011-2014**

No.	Tahun	Penduduk Miskin
1.	2011	32.340
2.	2012	32.901
3.	2013	32.500
4.	2014	31.000

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru, 2016

Untuk itu di tengah kondisi distortif tersebut, proses natural dalam pembangunan tidak dapat terjadi begitu saja. Proses natural harus diciptakan intervensi pemerintah, dengan kebijakan–kebijakan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang mendekati asumsi–asumsi pembangunan. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. (2007), disebutkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional ada tiga pertanyaan pokok yang perlu dijawab yaitu :

- 1) Pembangunan perlu diletakkan pada arah perubahan struktur.
- 2) Pembangunan perlu diletakkan pada pemberdayaan masyarakat untuk menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
- 3) Pembangunan perlu diletakkan pada arah koordinasi lintas sektoral mencakup program pembangunan antar sektor, pembangunan antar daerah, dan pembangunan khusus.

Dalam pelaksanaannya, usaha untuk menjawab ketiga arah pembangunan itu harus dilaksanakan secara terpadu, terarah dan sistematis, pemberian ruang lingkup dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat untuk berpartisipasi dapat bersinergi dengan upaya untuk menanggulangi masalah pengangguran, kemiskinan dan ketidakmerataan. Kebutuhan manajemen pemberdayaan mendapatkan relevansinya dalam upaya pemerintah menanggulangi kemiskinan, masalah kemiskinan menjadi pembicaraan banyak pihak karena kemiskinan merupakan masalah multisektoral dan menjadi tanggung jawab semua pihak, baik dari tingkat kementerian/lembaga maupun individu masyarakat. Perhatian serius pada keluarga miskin dilihat dari kebijakan-kebijakan aktivitas yang dilakukan pemerintah yang sasarannya adalah keluarga miskin (Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, 2007).

Sektor pembangunan dibidang perekonomian Indonesia adalah koperasi, disamping Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), namun dari tiga bentuk pelaku ekonomi tersebut, koperasi merupakan salah satu bentuk gerakan ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan sistem Demokrasi Pancasila, oleh sebab itu perlu ditumbuh kembangkan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Tujuan utama dari terbentuknya koperasi adalah untuk membantu mensejahterakan masyarakat sekitar terutama para anggota dari koperasi tersebut. Bantuan yang diberikan koperasi bermacam-macam seperti menjual bahan-bahan pertanian yang murah, bantuan simpan pinjam dan sebagainya. Keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan adalah dengan mengembangkan usaha

kecil yang merupakan sector yang strategis dan potensial dalam menyerap tenaga kerja baru. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan bertujuan meningkatkan pendapatan usaha kecil sehingga dapat berkembang dan menjadi besar serta memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan pertimbangan tersebut, diharapkan semua pihak dapat memberikan dukungan terhadap perkembangan usaha kecil ini.

Perkembangan koperasi di Pekanbaru pada tahun 2012 sebanyak 986 koperasi, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 954 koperasi pada tahun 2011 atau meningkat sekitar 3,35 persen. Pada tahun 2013 jumlah koperasi di Pekanbaru sebanyak 909 koperasi, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 986 koperasi atau menurun sekitar 7,81 persen. Pada tahun 2014 jumlah koperasi di Pekanbaru sebanyak 923 koperasi, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 909 koperasi atau meningkat sekitar 1,54 persen. Jadi, perkembangan koperasi di Pekanbaru mengalami naik turun, seharusnya pemerintah dapat menstabilkan perkembangan koperasi di Pekanbaru ini agar dapat menyerap tenaga kerja baru sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran berkurang. Perkembangan jumlah/total koperasi di Pekanbaru pada tahun 2011 – 2014 dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel I. 5 : Perkembangan Jumlah Koperasi**Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014**

No.	Tahun	Jumlah/Total Koperasi
1.	2011	954 Koperasi
2.	2012	986 Koperasi
3.	2013	909 Koperasi
4.	2014	923 Koperasi

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, 2016

Kemudian perkembangan jumlah/total dan tenaga kerja pada data keragaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru juga mengalami naik turun, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel I. 6 : Perkembangan Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah
dan Tenaga Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru
Tahun 2011-2014.**

No.	Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
1.	2011	5.400	2.640	40	8.804
	Tenaga Kerja	16.200	8.525	1.144	25.869
2.	2012	7.236	3.564	108	10.908
	Tenaga Kerja	18.000	9.560	1.500	29.060
3.	2013	7.100	3.509	244	10.853
	Tenaga Kerja	8.446	4.418	642	13.506

No.	Tahun	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah	Jumlah
4.	2014	8.207	3.716	244	12.167
	Tenaga Kerja	8.546	4.438	672	13.656
5.	2015	9.389	2.669	144	12.202
	Tenaga Kerja	10.919	4.052	320	15.291

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

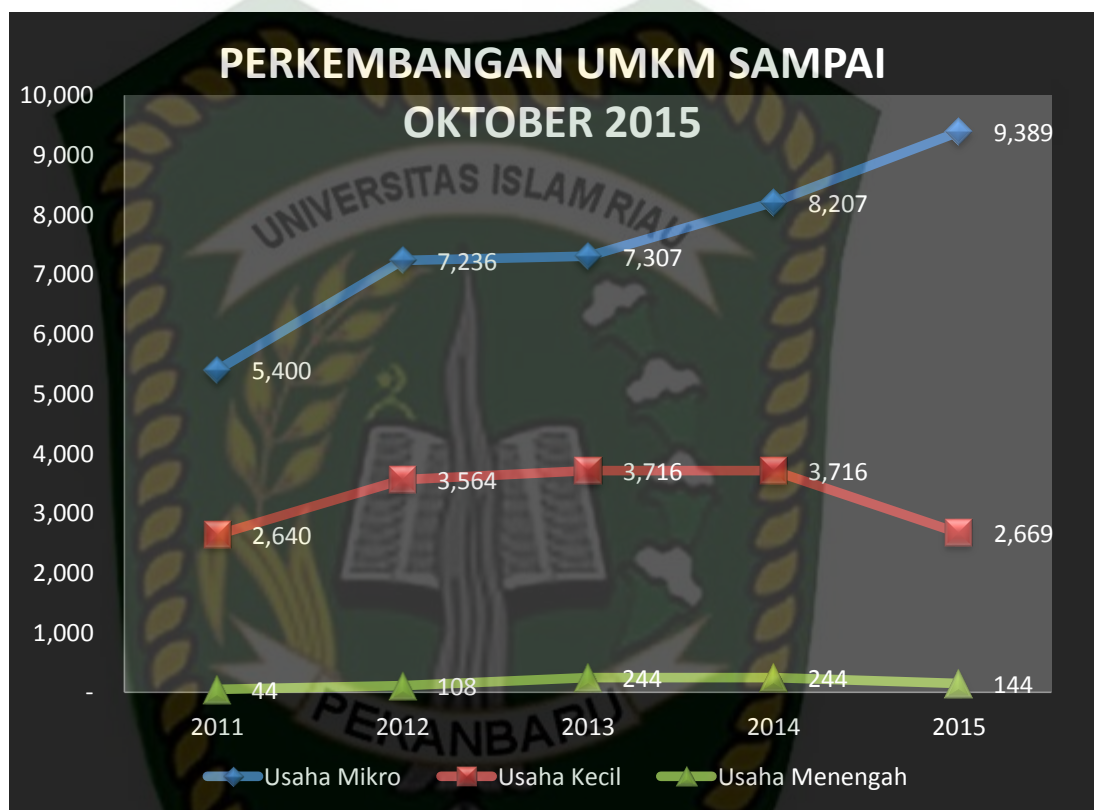
Kota Pekanbaru, 2016.

Dan berikut statistik perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami naik turun atau tidak stabil mulai dari tahun 2011 hingga Oktober 2015 :

Gambar I. 3 : Statistik Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota

Pekanbaru

Tahun 2011 – Oktober 2015



Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru, 2016.

Strategi pembangunan Kota Pekanbaru merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Pekanbaru. Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan di Kota Pekanbaru serta sebagai dasar untuk

menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Sejalan hal tersebut, sebagai upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi pembangunan daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Salah satu strategi pembangunan kota Pekanbaru yang terkait dengan judul penelitian ini adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang tercantum dalam Misi ke-5 No. 2 pada tabel dibawah ini :

Tabel I. 7. Misi ke-5 : Meningkatkan Perekon

omian Daerah dan Masyarakat Dengan Meningkatkan Investasi Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dengan Dukungan Fasilitas Yang Memadai dan Iklim Usaha Yang Kondusif. No. 2

Tujuan	Sasaran	Strategi (Untuk Mencapai Sasaran)	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.	Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM Serta Lembaga Keuangan Mikro.	1. Pengembangan Kelembagaan Koperasi. 2. Pengembangan Akses Pelayanan dan Sumber Pendanaan Koperasi dan UKM.	1a. Penerapan manajemen modern pada koperasi. 1b. Penyuluhan Koperasi. 2a. Fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM. 2b. Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin.

			2c. Pendampingan usaha produktif koperasi.
--	--	--	--

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017.

Berikut program/kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru yang di targetkan dan terealisasikan terkait misi Ke-5 No. 2 Kota Pekanbaru dalam memberdayakan masyarakat miskin dengan meningkatkan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2015:



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel I. 8 menggambarkan keadaan target dan realisasi anggaran program/kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru tahun 2015, dapat dilihat bahwa realisasi anggaran program/kegiatan kurang sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu :

1. Realisasi pada program/kegiatan penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif sebesar Rp. 218.530.700 kurang sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp.226.947.350.
2. Realisasi pada program/kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi mikro kecil menengah sebesar Rp. 48.728.400 kurang sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp. 58.564.600.
3. Realisasi pada program/kegiatan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan sebesar Rp. 144.893.100 kurang sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp. 154.222.300.
4. Realisasi program/kegiatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah sebesar Rp. 300.615.800 kurang sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp. 304.333.100.
5. Realisasi program/kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan sebesar Rp. 84.498.800 kurang sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp. 92.529.000.
6. Realisasi program/kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sebesar Rp. 860.620.750 kurang sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp. 872.708.050.

7. Realisasi program/kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi sebesar Rp. 374.950.600 kurang sesuai dengan yang ditargetkan sebesar Rp. 377.558.500.

Dari hasil pra survey, kemiskinan yang dapat dilihat dari tingkat pengangguran, serta strategi pembangunan kota Pekanbaru dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada misi ke-5 No. 2, maka penulis dapat mengemukakan dan mengidentifikasi fenomena-fenomena yang menghambat dan kurang terealisasi/terlaksana dengan baik sebagai berikut :

1. Lambatnya realisasi dana permodalan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Masyarakat belum dilibatkan dalam segala penyusunan rencana, sehingga program pembangunan tidak diikuti peran aktif masyarakat.
3. Meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Kota Pekanbaru.
4. Strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin Kota Pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kurang terlaksana dengan sangat baik.

Berdasarkan fenomena-fenomena diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”**.

B. Rumusan Masalah

Upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui Program Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan memberikan peluang bagi masyarakat untuk membangun dirinya secara partisipatif. Konsep tersebut memberikan dasar dan sasaran dalam upaya perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat, membangkitkan partisipasi masyarakat, dan penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.

Atas dasar gambaran latar belakang di atas maka dalam kajian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
- 2) Apakah berhasil dengan sangat terlaksana Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah :

- a. Mengetahui Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

- b. Mengetahui apakah berhasil meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu administrasi publik.
- b. Secara praktis, sebagai bahan informasi dan masukan bagi Dinas Kopeasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.
- c. Secara akademis, sebagai bahan informasi dan perbandingan bagi penulis lainnya yang ingin membahas permasalahan yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Administrasi adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Silalahi (dalam Zulkifli, 2005;20).

Menurut The Liang Gie, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Administrasi menurut Ulbert Silalahi (2002 ; 11) administrasi adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok manusia berdasarkan pembagian kerja sama sebagaimana yang di tentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan aktifitas administrasi dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari organisasi.

Siagian (2007 ; 3) memberi pengertian tentang administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Selanjutnya Simond dkk dalam Sufyan (2005 ; 115)

mengatakan bahwa administrasi sebagian kegiatan dari pada kelompok yang mengadakan kerja sama untuk menyelesaikan tujuan bersama.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa administrasi adalah sebagai suatu proses kerja sama sekurangnya dua orang dalam suatu kelompok untuk mencapai sesuatu tujuan tersebut diperlukan adanya suatu wadah yang disebut dengan organisasi.

Menjalankan proses administrasi dalam suatu organisasi tidak terlepas dari adanya unsur manajemen, karena manajemen merupakan penggerak agar tujuan dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Pada definisi tersebut mempunyai kesamaan, yaitu proses kerjasama untuk mencapai tujuan. Melihat proses kerjasama untuk mencapai suatu tujuan dalam objek administrasi dan organisasi, maka terdapat beberapa hubungan penting yang perlu dipahami pada konsep administrasi dan organisasi (Atmosudirdjo,2003;51-55) yaitu :

1. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi terdapat di dalam suatu organisasi.
2. Administrasi merupakan suatu kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan adalah “administrator” yang harus pandai menggerakkan seluruh sistemnya yang terdiri atas para manajer, staffer, dan personil lainnya.
3. Administrasi merupakan suatu proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya yang berlangsung melalui organisasi.

Hal lain yang dapat dicermati dari sejumlah definisi tersebut adalah bahwa prioritas utama administrasi terciptanya tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal, baik dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas utama dan aktivitas penunjang maupun dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

Dari definisi menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan administrasi adalah suatu proses kegiatan dalam pelaksanaan dan pengendalian kerja sama yang ditata untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Konsep Organisasi

Menurut Sutarto (1995), organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau sistem social.

Menurut Griffin dan Morhead (1996), organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi.

Maka dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah atau kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi manajemen sumber daya manusia mencakup kedalam perekrutan, kompensasi, pelatihan, dan pembangunan. (Robert L.M dan Jhon HJ.2001 ; 4).

Menurut pendapat Moekijat (2005 ; 6) organisasi adalah kerangka didalam mana orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. Tercapainya efektifitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi, tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian.

Sedangkan organisasi sebagai wadah yang relatif statis, antara lain mempunyai makna, (siagian, 2000 ; 9) :

1. Organisasi dipandang merupakan pengembangan jaringan hubungan kerja yang sifatnya formal serta tergambar pada kotak-kotak kedudukan dan jabatan yang diduduki oleh orang-orang.
2. Organisasi dipandang sebagai rangkaian hirarkis kedudukan dan jabatan yang menggambarkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab.
3. Organisasi dipandang secara alat penetapan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Setiap organisasi mempunyai misi dan tujuan-tujuan tertentu, misalnya bagi swasta adalah untuk mendapatkan keuntungan, bagi pemerintahan organisasi memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dan organisasi sosial. Organisasi adalah untuk membantu masyarakat agar menjadi sejahtera dan mandiri. Tujuan-tujuan organisasi tersebut hanya dapat dicapai dengan sebaik-baiknya apabila pengelolaan organisasi disusun dalam suatu sistem manajemen yang baik. Organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara

dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan. Sedangkan sumber dayanya ialah sebagai berikut :

1. *Man* (manusia)
2. *Money* (uang)
3. *Material* (peralatan)
4. *Machines* (mesin-mesin)
5. *Method* (metoda)
6. *Market* (pasar)

Setiap organisasi publik atau bisnis selalu dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Semakin besar suatu organisasi maka semakin kompleks pula bentuk, jenis dan sifat interaksi yang terjadi dalam menghadapi dua jenis lingkungan tersebut. Salah satu implikasinya adalah dalam proses pengambilan keputusan yang dewasa ini semakin sulit dan rumit. Untuk itu di butuhkan langkah-langkah strategi supaya organisasi mampu menghadapi kompleksitas lingkungan internal dan eksternal.

Efektifitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran (hasil akhir) yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian hasil akhir yang sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan ukuran

maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

Sedangkan efisiensi merupakan bagian yang terpenting dalam organisasi. Efisiensi itu mengacu pada hubungan antara pengeluaran dan masukan (*output/input*). Menurut drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar (*doing things right*), sedangkan efektif adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*). Dalam bahasa yang lebih sederhana, efisiensi itu menunjukkan kemampuan organisasi dalam menggunakan sumber daya dengan benar dan tidak ada pemborosan. Karena setiap perusahaan akan berusaha mencapai tingkat output dan input yang seoptimal mungkin.

Jadi, dengan demikian antara efektifitas dan efisiensi itu saling terkait, karena organisasi tidak hanya dituntut untuk mengejar tujuan semata, akan tetapi bagaimana tujuan itu bisa dicapai dengan cara efektif dan efisien.

Didalam menjalankan suatu organisasi, pada umumnya ada tiga model proses strategi manajemen yang saling berkaitan, yaitu :

1. Perumusan Strategi (*Strategi Formulation*).

Pada tahap ini organisasi harus mampu menentukan visi dan misi secara tujuan yang ingin di capai oleh organisasi, dimana langkah-langkahnya seperti:

- a. Mengembangkan visi dan misi strategis.
- b. Analistis lingkungan organisasi.

- c. Menentukan tujuan.
- d. Penentuan strategi organisasi.

2. Implementasi Strategi (*Strategy Implementation*).

Pada tahap ini organisasi akan menjalankan strategi yang sudah dipilih dan melakukan keputusan taktis dengan efektif dan efisien. Dimana langkah-langkah nya seperti:

- a. Mempersiapkan struktur, meliputi struktur fisik, metode spesialisasi, koordinasi, delegasi wewenang dan organisasi informal.
- b. Menjalankan proses, meliputi alokasi sumber daya, system informasi, system imbalan, system promosi dan produser pelaksanaan.
- c. Mengembangkan perilaku, meliputi perilaku antar pribadi dalam organisasi, gaya kepemimpinan dan penggunaan kekuasaan.

3. Evaluasi Strategi.

Pada tahap ini organisasi akan melakukan evaluasi dan pemeriksaan yang sudah dipilih dan melakukan keputusan taktis dengan efektif dan efisien. Dimana langkah-langkahnya seperti:

- a. Memiliki kecermatan dan ketelitian kerja.
- b. Menghasilkan kualitas kerja yang bagus.
- c. Memiliki kredibilitas dan efisiensi kerja.

(Bambang Hariadi, 2003 ; 4-14).

3. Konsep Manajemen

Menurut George Terry (1964), manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya.

Menurut Dalton E. MC Farland, manajemen adalah suatu proses yang mana manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara, dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia.

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organization*), pelaksanaan (*Actuating*), dan pengawasan (*Controlling*) atau disingkat (POAC) dan melaksanakan tujuan organisasi melalui kerjasama.

Manajemen menurut Handoko (2007 ; 8) adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha- usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lain nya agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tohardi (2006 ; 10) juga mengatakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Ungkapan ini juga diperkuat oleh Stoner dalam Tohardi (2006 ; 10) bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengendalian usaha-usaha organisasi serta penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian manajemen merupakan seni dan ilmu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kegiatan orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Manulang (2008 ; 94) bahwa manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan dari pada sumber daya, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut Siagian (2004 ; 5) manajemen merupakan proses penyelenggara berbagai kegiatan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manaterial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapain tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan kata lain, manajemen merupakan inti dari administrasi kerana memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Pihak manajemen organisasi merupakan penanggung jawab terciptanya proses kerjasama yang harmonis. Jika upayanya itu di iringi dengan tindakan proporsional dalam hal pengelompokan tugas, pembagian kerja, pendelegasian wewenang, dan merumuskan hubungan kerja, maka dapat memberikan daya dan hasil guna yang optimal kepada pencapaian organisasi. Persyaratan utamanya adalah harus sesuai dengan tuntutan teknis dan manejerial pengoperasionalan setiap item fungsi dan tugas yang melekat pada organisasi itu.

Konsep ini sangat populer dan fenomenal di kalangan praktisi manajemen organisasi maupun kalangan akademisi yang menekuni studi ilmu administrasi. Berpedoman kepada sejumlah literatur manajemen, juga ditemukan sudut pandang yang berbeda di kalangan praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep manajemen. Berikut salah satu dari beberapa definisi yang bersumber dari sejumlah literatur :

George R. Terry (dalam Sarwoto, 1983;46). Mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas, terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, actuating, dan controlling dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

The Liang Gie (1993;14). Menurutnya, manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki 6 (enam) fungsi utama, yaitu : perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, penyempurnaan.

1. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.

2. Pembuatan keputusan adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantara berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.
3. Pengarahan adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan kedisiplinan, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
4. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, dan kekosongan tindakan.
5. Pengontrolan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Dari batasan manajemen tersebut diatas disyaratkan bahwa manajemen terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang terintegrasi sebagai satu kesatuan utuh. Untuk menjabarkan secara baik dari setiap fungsi tersebut dalam suatu kerjasama mencapai sasaran organisasi, maka kepada setiap perumus kebijakan dan pelaksananya juga dituntut memiliki pengetahuan dan keahlian yang spesifik. Argument teoritisnya karena objek utama pelaksanaan

setiap fungsi manajemen tersebut adalah manusia sumberdaya yang esensial suatu organisasi.

Melihat kepada item-item yang terkandung dalam definisi konsep manajemen tersebut dapat diinterpretasikan lebih lanjut, bahwa manajemen pada dasarnya merupakan akumulatif kemampuan dan keterampilan mengembangkan berbagai strategi serta pendekatan untuk membangkitkan motivasi personil agar mau dan suka bekerjasama serta memberikan potensi yang dimilikinya dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Banyak definisi yang diberikan terhadap istilah manajemen. Beberapa penulis memberikan pengertian, antara lain :

1. Haroold Koontz dan Cyril O'donnel

Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian.

2. R. Terry

Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang

telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

3. James F. Stoner

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

4. Albert Lepawsky

“Manajemen adalah tenaga/kekuatan yang memimpin, member petunjuk dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu”. Buku : *Administration : The Art of Organization and Management*.

5. Dalton E. MC Farland

“Manajemen adalah suatu proses yang mana manajer sebagai mencipta, mengarahkan, memelihara, dan melaksanakan tujuan organisasi melalui koordinasi dan kerjasama dari usaha manusia”. Buku : *Management Farland Foundations and Practices*.

Jadi, di dalam pengertian manajemen, kita akan dapat melihat kegiatan orang-orang dalam menyelesaikan tugasnya berdasarkan pembagian kekuasaan, fungsi yang disebut sebagai merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan, berjalan melalui hierarki organisasi dari atas kebawah dalam memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber

daya lainnya dengan mempergunakan cara-cara pengerjaan yang telah ditentukan dalam proses pencapaian tujuannya. Apabila alasan nya demikian, maka manajemen dapat diberikan batasan sebagai suatu system pendayagunaan dan pengendalian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

4. Pembangunan

Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur, sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat pula.

Kriteria keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang berarti adanya penurunan jumlah keluarga miskin. Penurunan jumlah keluarga miskin ini merupakan faktor terpenting, oleh karena itu selalu diupayakan dengan berbagai strategi kebijakan khusus melalui lintas instansi dan lintas program. Upaya penurunan banyaknya keluarga miskin diarahkan melalui pendekatan pemberdayaan dan perbaikan sektor ekonomi dengan pemberian pelatihan keterampilan, peningkatan akses ke sumber daya, dan bantuan modal usaha produktif.

Perencanaan pembangunan sendiri adalah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif, atau sebagai peran

arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan.

Ciri perencanaan pembangunan :

- a. Berisi upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi
- b. Meningkatnya pendapatan perkapita
- c. Merubah struktur ekonomi
- d. Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Menurut Sumodinigrat (1999), bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Menurut Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia, penciptaan peluang

berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental, terdidik dan kuat, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat merupakan unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat itu sendiri menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik disebut sebagai ketahanan nasional. Artinya apabila masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, maka hal tersebut merupakan bagian dari ketahanan ekonomi nasional.

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya dalam pemberdayaan masyarakat haruslah dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik

tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi atau daya yang dapat di kembangkan. Dalam hal ini pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 2005).

6. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Menurut Iwan Nugroho (2004), Untuk mengukur tingkat kemiskinan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan absolut dan relatif. **Ukuran Kemiskinan absolut** adalah pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Sedangkan **Ukuran Kemiskinan Relatif** adalah pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi oleh ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi.

Pengertian kemiskinan yang lebih luas disampaikan oleh John Friedman (Ala, 1996;4) yang menyatakan bahwa kemiskinan sebagai ketidakseimbangan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial, yaitu kemampuan untuk

menguasai peluang strategis yang bisa mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. ada lima ciri kemiskinan yang meliputi:

- a. Tidak memiliki faktor produksi,
- b. Tingkat pendidikan rendah,
- c. Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri,
- d. Kebanyakan tinggal di desa, dan
- e. Banyak hidup di kota berusia muda dan tanpa keahlian (*Skill*).

Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi yang serba kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan (tempat tinggal), kesehatan, dari pendidikan. BKKBN tahun 2008 menyebutkan bahwa, indikator kemiskinan adalah :

- 1) Tidak mampu makan dua kali sehari.
- 2) Tidak mampu mengkonsumsi daging/ikan/telur minimal sekali seminggu.
- 3) Tidak mampu ke sarana kesehatan modern untuk ber KB atau berobat
- 4) Tidak mampu menyekolahkan anak usia SD dan SLTP.
- 5) Tidak ada anggota keluarga yang memiliki penghasilan tetap.

BPS tahun 2008 menyebutkan bahwa, indikator kemiskinan adalah :

- 1) Luas lantai rumah <8 meter persegi.
- 2) Jenis lantai terluas (tanah/bambu/kayu murahan).

- 3) Jenis dinding bangunan (bambu/rumbia/ tembok tanpa pelster.
- 4) Fasilitas buang air besar (tidak ada).
- 5) Sumber air minum.
- 6) Sumber penerangan utama.
- 7) Bahan bakar untuk masak (kayu/arang/minyak).
- 8) Tidak mampu beli daging/ikan/telur/susu minimal sekali seminggu.
- 9) Makan kurang dari dua kali sehari.
- 10) Tidak mampu membeli pakaian baru minimal satu stel setahun.
- 11) Tidak mampu bayar untuk berobat ke sarana kesehatan modern.
- 12) Luas sawah < 0,5 ha atau pendapatan <Rp.600.000 per rumah tangga per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga SD ke bawah.
- 14) Kepemilikan tabungan dan aset kurang dari Rp.500.000,-.

7. Masyarakat Miskin

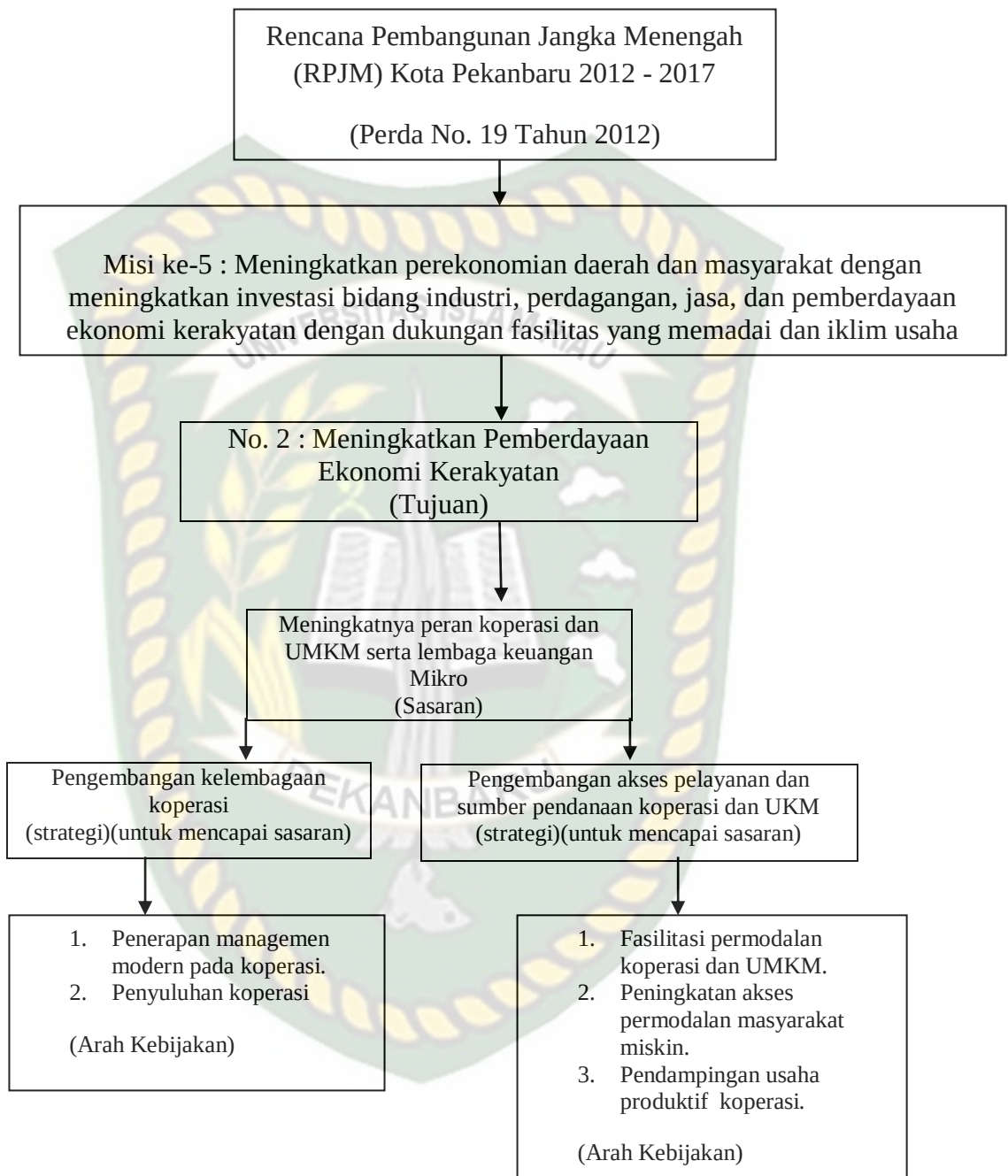
Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini adalah membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variable penelitian dengan indikator-indikator penentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Strategi pembangunan Kota Pekanbaru merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Pekanbaru. Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan di Kota Pekanbaru serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya.

Sejalan hal tersebut, sebagai upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi pembangunan daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang secara rinci disajikan pada kerangka pikir penelitian berikut ini :

Gambar II. 1 : Kerangka Pikir

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. (Modifikasi Penulis).

C. Hipotesis

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan pada fenomena empiris yang dikaitkan dengan teori yang ada, maka hipotesis dari penelitian ini adalah diduga bahwa strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 Pada Misi Ke 5 No.2, yaitu: Meningkatnya Peran Koperasi dan UMKM kurang terlaksana dengan sangat baik.

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah penganalisaan dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan konsep operasional yang digunakan, yaitu :

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.
2. Pembangunan adalah proses natural mewujudkan cita-cita bernegara yaitu terwujudnya masyarakat makmur, sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat pula.
3. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

4. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.
5. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi social, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
6. Strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Pekanbaru tahun 2012 – 2017 pada misi ke-5 No. 2, yaitu meningkatnya peran koperasi dan UMKM :
 - a. Pengembangan kelembagaan koperasi, yang meliputi :
 - 1) Penerapan manajemen modern pada koperasi.
 - 2) penyuluhan koperasi.

b. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UKM, yang meliputi :

- 1) Fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM.
- 2) Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin.
- 3) Pendampingan usaha produktif koperasi.

E. Operasional Variabel

Dalam mewujudkan sebuah penelitian yang baik, maka penulis tampilkan operasional variabel yang merupakan realisasi dari konsep operasional penelitian dan juga untuk mempermudah menampilkan hasil penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep yang telah diukur. Sehingga operasional variabel diperlukan dalam penulisan sebuah penelitian.

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variable, indikator, item pertanyaan, skala ukuran dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Sehingga variable merupakan realisasi dari konsep operasional penelitian serta pembahasan dalam sebuah konsep yang telah diukur. Maka operasional variabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II. 1 : Operasional Variabel Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Konsep	Variabel	Indikator	Item Yang Dinilai	Skala
Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Adalah Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 Pada Misi Ke 5 No.2, yaitu: Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM Serta Lembaga Keuangan Mikro.	Strategi Pembangunan.	Pengembangan kelembagaan koperasi.	1. Penerapan manajemen modern pada koperasi. 2. Penyuluhan koperasi.	1. Sangat Terlaksana 2. Terlaksana 3. Cukup Terlaksana 4. Kurang Terlaksana 5. Sangat Tidak Terlaksana
		Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UKM.	1. Fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM. 2. Peningkatan akses permodalan masyarakat miskin. 3. Pendampingan usaha produktif koperasi.	

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Pekanbaru Tahun 2012-2017. (Modifikasi Penulis).

F. Teknik Pengukuran

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan atau metode skoring. Kategori ukuran untuk menilai masing-masing alternative jawaban terdiri dari lima (5) kategori dengan nilai skor sebagai berikut :

- Sangat Terlaksana = nilai skor 5

- Terlaksana = nilai skor 4
- Cukup Terlaksana = nilai skor 3
- Kurang Terlaksana = nilai skor 2
- Sangat Tidak Terlaksana = nilai skor 1

1. Pengembangan Kelembagaan Koperasi, untuk indikator diajukan 2 pertanyaan untuk 60 responden dengan skor tertinggi 5 dan terendah 1.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Mencari Skor Tertinggi dan Skor Terendah untuk menentukan Range Skor (Rentang Skor)

$$\text{Range Skor} = \frac{\text{Skor. Tertinggi} - \text{Skor. Terendah}}{\text{Jumlah Klasifikasi}}$$

Skor Tertinggi = Skor Tertinggi tiap item x Jumlah item pertanyaan x Jumlah responden

$$= 5 \times 2 \times 60$$

$$= 600$$

Skor Terendah = Skor Terendah tiap item x jumlah item pertanyaan x Jumlah responden

$$= 1 \times 2 \times 60$$

$$= 120$$

Jadi, Range Skornya = $\frac{600 - 120}{5}$

$$RS = 96$$

Sangat Terlaksana = 504 - 600

Terlaksana = 408 - 504

Cukup Terlaksana = 312 - 408

Kurang Terlaksana = 216 - 312

Sangat Tidak Terlaksana = 120 - 216

2. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UKM, untuk indikator diajukan 3 pertanyaan untuk 60 responden dengan skor tertinggi 5 dan terendah 1. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

Mencari Skor Tertinggi dan Skor Terendah untuk menentukan Range Skor (Rentang Skor)

$$\text{Range Skor} = \frac{\text{Skor. Tertinggi} - \text{Skor. Terendah}}{\text{Jumlah Klasifikasi}}$$

Skor Tertinggi = Skor Tertinggi tiap item x Jumlah item pertanyaan x Jumlah responden

$$= 5 \times 3 \times 60$$

$$= 900$$

Skor Terendah = Skor Terendah tiap item x jumlah item pertanyaan x Jumlah responden

$$= 1 \times 3 \times 60$$

$$= 180$$

Jadi, Range Skornya = $\frac{900 - 180}{5}$

$$\text{RS} = 144$$

Sangat Terlaksana = 756 - 900

Terlaksana = 612 - 756

Cukup Terlaksana = 468 - 612

Kurang Terlaksana = 324 - 468

Sangat Tidak Terlaksana = 180 - 324

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian kuantitatif, menurut Sugiyono(2012;7) yaitu metode penelitian yang sistematis, jelas, terencana sejak awal hingga akhir penelitian, dimulai dari penelitian menemukan masalah dan mengembangkan masalah tersebut melalui membaca beberapa referensi yang nantinya akan memunculkan hipotesis yang akan dibuktikan melalui kuisioner/angket yang diberikan kepada responden atau sampel dari beberapa populasi yang dipilih melalui *random sampling*, hasil penelitian dari metode kuantitatif secara umum akan berupa data-data/angka-angka. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menjelaskan tentang fenomena dan fakta social yang terjadi secara objektif dilapangan, maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah Deskriptif, yaitu menurut Sugiyono (2003;11) suatu penelitian yang mendeskripsikan atau menjelaskan tentang suatu fenomena sosial atau kejadian tertentu untuk mengetahui nilai variabel. Berdasarkan teori tersebut diatas, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif.

Penelitian ini direncanakan menggunakan sampel (responden) dalam pengumpulan data. Dengan melihat kondisi sampel diatas, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuisioner. Data

yang berhasil dikumpulkan tersebut digunakan sebagai alat bantu menganalisis variabel beserta indikatornya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, dan 30 Koperasi dan 30 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

Alasan mengapa penulis melakukan penelitian di Kota Pekanbaru karena ingin menjadi salah satu masyarakat Pekanbaru yang sadar akan pengawasan setiap kebijakan Pemerintah, yang sekaligus adalah tempat kelahiran penulis, sehingga pertimbangan factor luasnya wilayah, waktu dan dana yang diperlukan dapat diminimalisir dibandingkan dengan daerah lainnya.

C. Populasi dan Sampel

Keseluruhan objek dan subjek yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 1 (satu) pengurus dari setiap 30 Koperasi, dan 1 (satu) pengurus setiap 30 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.

No.	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Koperasi Campur Sari	1 Orang Pengurus	100%
2.	Koperasi Konsumen Koripindo	1 Orang Pengurus	100%
3.	Koperasi Syariah Bina Insan Mulia	1 Orang Pengurus	100%

No.	Populasi	Sampel	Persentase
4.	Primkoppad Perhub Wil 031	1 Orang Pengurus	100%
5.	Wanita Pesona Martha	1 Orang Pengurus	100%
6.	Koperasi Wanita Beringin	1 Orang Pengurus	100%
7.	Inpres Mandiri	1 Orang Pengurus	100%
8.	Riau Mandiri (KOPRIMA)	1 Orang Pengurus	100%
9.	Primkopau Skuadron 12	1 Orang Pengurus	100%
10.	Primkopau Paskhas Lanud Pekanbaru	1 Orang Pengurus	100%
11.	Koperasi Tumbuh Mandiri	1 Orang Pengurus	100%
12.	Tri Bakti Yys	1 Orang Pengurus	100%
13.	As-Shofa	1 Orang Pengurus	100%
14.	Holland	1 Orang Pengurus	100%
15.	Permata Bunda	1 Orang Pengurus	100%
16.	Muara Madu	1 Orang Pengurus	100%
17.	Karya Bersama	1 Orang Pengurus	100%
18.	Koperasi Mikro Ekonomi Kerakyatan	1 Orang Pengurus	100%
19.	Mitra Utama	1 Orang Pengurus	100%
20.	Ummul Hidayah	1 Orang Pengurus	100%
21.	Koperasi Wanita Kemuning	1 Orang Pengurus	100%
22.	Primkopad Den Pom I/15	1 Orang Pengurus	100%
23.	Aliansi Pedagang Pasar Pekanbaru	1 Orang Pengurus	100%
24.	Damai Sejahtera	1 Orang Pengurus	100%
25.	Sejahtera Mandiri	1 Orang Pengurus	100%
26.	Mitra Mandiri	1 Orang Pengurus	100%
27.	Koperasi Pegawai Telkom (KOPEGTEL)	1 Orang Pengurus	100%
28.	Koperasi Karya Makmur	1 Orang Pengurus	100%
29.	Koperasi Sejahtera RW17	1 Orang Pengurus	100%
30.	Berdikari Makmur	1 Orang Pengurus	100%
31.	Indriani Ponsel	1 Orang Pengurus	100%
32.	Laundry Jack	1 Orang Pengurus	100%
33.	Kedai Lala	1 Orang Pengurus	100%
34.	Pabrik Tempe	1 Orang Pengurus	100%
35.	Toko Tas Petrizon	1 Orang Pengurus	100%
36.	UD. T. Zami	1 Orang Pengurus	100%
37.	Penjahit Daffa	1 Orang Pengurus	100%
38.	Kedai Aneka Kue	1 Orang Pengurus	100%
39.	Usaha Dagang Mainar	1 Orang Pengurus	100%
40.	Kue Kacang Apensa	1 Orang Pengurus	100%
41.	Pengrajin Rotan USM	1 Orang Pengurus	100%
42.	Martabak Mesir Mini	1 Orang Pengurus	100%
43.	Venus Roti Canai	1 Orang Pengurus	100%
44.	Kedai Harian Iswandi	1 Orang Pengurus	100%

No.	Populasi	Sampel	Persentase
45.	Toko Busana Muslim	1 Orang Pengurus	100%
46.	Audio Ban dan Velg	1 Orang Pengurus	100%
47.	CV. Restu	1 Orang Pengurus	100%
48.	Bakso Ayam Anggoro	1 Orang Pengurus	100%
49.	PT. Deye Alkes Indo	1 Orang Pengurus	100%
50.	Medan Jepara	1 Orang Pengurus	100%
51.	Salon Novita	1 Orang Pengurus	100%
52.	Tenun Siak Zahwa	1 Orang Pengurus	100%
53.	Ternak Jangkrik Wirdanita	1 Orang Pengurus	100%
54.	Iza Bakery	1 Orang Pengurus	100%
55.	Ternak Bebek Triono	1 Orang Pengurus	100%
56.	Ternak Ayam Nasrudin	1 Orang Pengurus	100%
57.	Karangan Bunga Fitri Ani	1 Orang Pengurus	100%
58.	Bolu Kemojo Aditya	1 Orang Pengurus	100%
59.	Aldi Rotan	1 Orang Pengurus	100%
60.	Bengkel Sepeda Motor Inarzy	1 Orang Pengurus	100%
Jumlah		60	100%

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru Tahun 2016.

D. Teknik Penarikan Sampel

Untuk Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Kota Pekanbaru menggunakan teknik *Random Sampling* atau menarik sampel secara acak, hal ini mengingat jumlah populasi pada bagian ini relatif besar, dan menimbang keterbatasan peneliti baik dari segi waktu dan materi dalam penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2003 ; 74-78) *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sample dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Responden atau objek yang diteliti yang berkaitan dengan Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru, yang meliputi :

- a. Identitas Responden.
- b. Pengembangan kelembagaan koperasi.
- c. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh instansi, yaitu :

- a. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.
- b. Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.
- c. Fungsi dan Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.
- d. Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, dan jumlah tenaga kerjanya.
- e. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru.

- f. Jumlah penduduk miskin Kota Pekanbaru.
- g. Tingkat pengangguran di Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Teknik Observasi.

Teknik Observasi ini dilakukan langsung kelapangan yang mana data ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat mendukung kegiatan penelitian ini. Dengan kata lain, kegiatan observasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi pendukung untuk kegiatan penelitian ini.

2. Teknik Kuisisioner (angket).

Teknik kuisisioner adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara tertulis dan kemudian mengajukannya kepada responden untuk menjawab pertanyaan tersebut.

3. Teknik Wawancara.

Teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung kepada responden untuk memperjelas hasil kuisisioner.

G. Teknik Analisis Data dan Uji Hipotesis

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara deskriptif yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk tabel dengan dilengkapi uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil keputusan.

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan pada fenomena empiris yang dikaitkan dengan teori yang ada, maka hipotesis dari penelitian ini adalah diduga strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 – 2017 Pada Misi Ke 5 No.2, yaitu: Meningkatnya Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kurang terlaksana dengan sangat baik.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

**Tabel III. 2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Analisis Strategi
Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota
Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah (UMKM).**

No	Jenis Kegiatan	BULAN DAN MINGGU TAHUN 2016														
		Januari- Februari- Maret-April				Mei - Juni				Juli- Agustus- September- Oktober				November - Desember		
		1	2	3	4	1	2	1	2	3	4	1	2			
1.	Penyusunan UP	x	x	x	x	x	x									
2.	Seminar UP							x	x							
3.	Revisi UP								x	x						
4.	Revisi Kuissioner									x	x					
5.	Rekomendasi Survey									x	x					
6.	Survey Lapangan										x	x				
7.	Analisis Data										x	x				
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)										x	x	x			
9.	Konsultasi Revisi Skripsi											x	x			
10.	Ujian Konfrehensif Skripsi												x	x	x	
11.	Revisi Skripsi													x	x	x
12.	Penggandaan Skripsi														x	x

BAB IV

DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru

Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru didirikan Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor 598/KP/1979 Tepatnya Pada tanggal 03 Oktober 1979, Pada tanggal 03 Januari 1981, Oleh Kepala kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru dan Melantik Kepala Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru dan Melantik Kepala Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang di angkat Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 124/KP/1980 Pada Tanggal 10 April 1980 Dalam Suatu Upacara Resmi.

Berdasarkan Keputusan Menteri perdagangan dan koperasi Nomor 355/KP/IX/1980 pada tanggal 08 September 1980 Klasifikasi kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru adalah Memakai Type B.

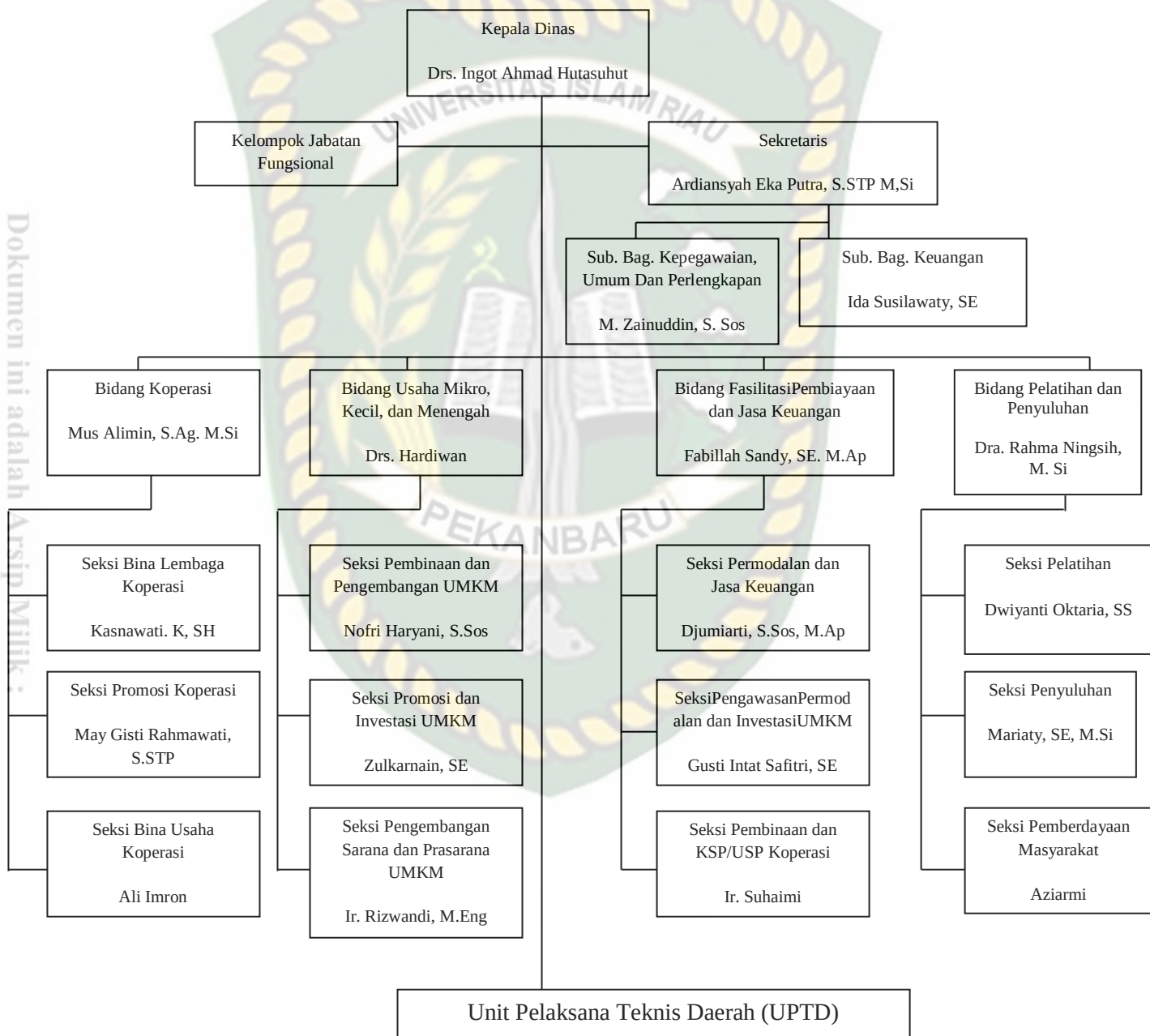
Pada mulanya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru Terletak di jalan Setia Budi No. 27. Pada tanggal 07 Oktober 1991 Pindah Menempati Gedung Lama Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru di Jalan Teratai No. 83 A Pekanbaru Sampai Sekarang, Sementara ini Kantor Dinas

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru Pindah lagi Kerumah Dinas Wali Kota yang baru di Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Kenyataannya Berjumlah 32 Orang Pegawai, Mengenai Jumlah Pegawai yang ada serta Tahun perkembangannya dalam tahun 1991 berjumlah 36 orang pegawai yang ada,serta tahun 1993 ternyata penurunan pegawai yang ada termasuk unsur pimpinan serta bawahannya.



B. Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.

Gambar IV.1 : Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.



C. Fungsi dan Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru

Dalam setiap perusahaan baik itu swasta ataupun pemerintahan, sangat diperlukan susunan organisasi dalam jabatan, tugas dan wewenang. Sehingga perusahaan itu akan memiliki arah tujuan dan aturan yang jelas.

Dan tujuan atau manfaat yang dibuatnya susunan organisasi ini agar tidak terjadi tumpang tindih dalam setiap bidang yang ada di perusahaan tersebut.

Struktur organisasi tersebut itu adalah susunan atau kerangka yang dibuat berdasarkan aturan dari berbagai bagian organ dan sebagainya sehingga merupakan kesatuan yang teratur.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 355/KP/1980 Struktur Organisasi Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru. Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan wewenang antara lain :

- a. Melakukan Bimbingan Usaha niaga dan saran perdagangan diwilayahnya terutama golongan ekonomi lemah serta menyusun laporan usaha niaga dan prasarana perdagangan.
- b. Melaksanakan registrasi, terhadap export dan import.
- c. Memonitor kegiatan export dan impor serta mempersiapkan penerbitan surat keterangan asal (SKA).

2. Sekretaris

Mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Sekretaris terdiri dari :

a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan perlengkapan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan serta perumusan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan keuangan di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru serta kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan perundang undangan.

c. Sub Bagian Penyuluhan Program

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru serta perumusan kebijaksanaan fasilitas kepegawaian pada dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

3. Bidang Koperasi

Mempunyai tugas mengkoordinasikan dan Merumuskan Program Operasional Pembinaan Koperasi Usaha Kecil anggota Koperasi. Sub Dinas Koperasi terdiri dari:

a. Seksi Bina Lembaga Koperasi

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan Rencana Program pembinaan , pedoman penyuluhan, penyusunan dan penyajian perangkat Koperasi di Bidang Kelembagaan.

b. Seksi Promosi Koperasi

Mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana program, Promosi koperasi, petunjuk teknis usaha dan kelembagaan di bidang koperasi serta evaluasi dan pelaporannya.

c. Seksi Bina Usaha Koperasi

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksan penyusunan perencanaan program, pedoman penyuluhan penyajian perangkat koperasi di Bidang Usaha, Petunjuk Teknik Usaha dan Kelembagaan Bidang Koperasi, Serta Evaluasi dan Pelaporannya.

4. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menyelenggarakan Usaha urusan Pekerjaan dan Kegiatan penyediaan dukungan Kerja sama dan Bantuan dalam Rangka Meningkatkan Peran

dan Kemampuan Pengusaha kecil dan Menengah. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan menengah terdiri dari:

- a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mempunyai Tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan Rencana program pembinaan, Pedoman penyuluhan, penyusunan, dan Penyajian Perangkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- b. Seksi Promosi dan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mempunyai tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan Rencana Program Pedoman Penyuluhan, Penyajian Perangkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang promosi dan Investasi, Petunjuk Teknis Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Usaha Kecil dan Menengah serta evaluasi dan Pelaporannya.

- c. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan Rencana Program, Penyusunan Petunjuk teknis pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5. Bidang Fasilitas dan jasa Keuangan

Mempunyai Tugas mengkoordinasikan, membina dan Merumuskan Program Pembiayaan dan Jasa keuangan terdiri dari:

a. Seksi Permodalan Dan Jasa Keuangan/

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan penyusunan rencana Program Pembinaan, Pedoman Penyuluhan, penyusunan dan Penyajian Perangkat, Petunjuk Teknis dan Pembinaan Penyimpanan bahan Pameran, pelaksanaan Pemberian Rekomendasi dibidang Koperasi yang Bergerak di Bidang Permodalan dan jasa keuangan.

b. Seksi pengawasan Permodalan Dan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Mempunyai Tugas Merumuskan dan Melaksanakan penyusunan rencana Program, perumusan dan Penyusunan petunjuk teknis, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan dan pengawasan permodalan dan Investasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

c. Seksi pembinaan dan Pengembangan KSP/USP Koperasi.

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan Perumusan dan Rencana Program, perumusan dan Penyusunan Petunjuk teknis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembinaan dan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

6. Bidang Pelatihan dan Penyuluhan

Mempunyai Tugas Mengkoordinasikan, membina dan Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan Pelatihan dan Penyuluhan penyusunan

dan pengembangan Kurikulum Silabus serta metode penelitian dan penyuluhan terdiri dari:

a. Seksi Pelatihan

Mempunyai Tugas Merumuskan dan Melaksanakan identifikasi kebutuhan pelatihan, Penyiapan Program Pelatihan, jadwal pelatihan pedoman, Perlengkapan, dan sertifikasi serta dokumentasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan menengah.

b. Seksi Penyuluhan

Mempunyai Tugas merumuskan dan Melaksanakan Penyusunan konsep dan Metode Penyuluhan Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Dokumentasi hasil Penyuluhan, Penyiapan sarana dan Prasarana Penyuluhan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai Tugas Merumuskan dan melaksanakan pembinaan Terhadap Koperasi Usaha Kecil dan menengah, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Pembiayaan, Permodalan, pasar dan Informasi Pasar, Kerja sama dalam Realisi Program Kemitraan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

7. Ruang Lingkup Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru.

Berikut ini akan dijelaskan sebagian besar aktivitas pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Yaitu Sebagai Berikut:

- a. Memberikan pelayanan Administrasi Kepada Semua Unsur kanwil Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru Serta Pelayanan Hukum.
- b. Melaksanakan Pengumpulan dan pengolahan Data, Penyusunan Program Evaluasi Tahunan dan laporan seta Pencatatan Izin Usaha dan Program pengendalian Lingkungan.
- c. Membuat Petunjuk dan Teknis pembinaan dan Penyiapan Perizinan Usaha bidang Industri
- d. Memberikan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijaksanaan Pembinaan dan pengembangan dibidang Industri.
- e. Memberikan Bimbingan Teknis Pembinaan Usaha Sarana perdagangan Seta Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan dan kebijaksanaan Teknis Usaha Perdagangan.
- f. Melaksanakan Tugas sesuai dengan Jabatan masing-masing Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.
- g. Menganalisa dan Menyusun Data Ekspor hasil Perindustrian Untuk Kegiatan pembinaan dan Pengawasan Mutu Serta Menyiapkan Bahan Perizinan Ekspor.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 (satu) pengurus dari setiap 30 Koperasi, dan 1 (satu) pengurus setiap 30 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru.

Adapun identitas responden yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelaminnya disajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel V.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Responden	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki – Laki	Perempuan	
1.	Pengurus Koperasi	25 Orang	5 Orang	30 Orang
2.	Pengurus UMKM	23 Orang	7 Orang	30 Orang
Jumlah		48 Orang	12 Orang	60 Orang
Persentase		80%	20%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016.

Dari tabel V.1 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjenis kelamin

perempuan, yaitu 48 orang (80%) pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjenis kelamin laki-laki dan 12 orang (20%) pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berjenis kelamin perempuan.

Hal ini terjadi karena pengurus yang berjenis kelamin laki-laki adalah dipercayai sebagai tanggung jawab atau sebagai pemimpin dalam setiap kelompok koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut.

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Tingkat umur manusia biasanya menentukan seseorang dalam mengendalikan jiwa emosinya. Tingkat umur juga mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku seseorang dalam melaksanakan aktivitas, meskipun bukan faktor yang dominan karena dengan umur yang cukup matang dimungkinkan seseorang memiliki pengalaman yang dapat dijadikan bahan perbandingan untuk masa yang akan datang. Adapun tingkat umur para respinden dapat dilihat pada tabel V.2 berikut :

Tabel V.2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

No.	Responden	Umur					Jumlah
		18 - 27 tahun	28 - 37 tahun	38 - 47 tahun	48 - 57 tahun	58 tahun keatas	
1.	Pengurus Koperasi	2 Orang	3 Orang	6 Orang	9 Orang	10 Orang	30 Orang
2.	Pengurus UMKM	11 Orang	4 Orang	7 Orang	8 Orang	-	30 Orang
Jumlah		13 Orang	7 Orang	13 Orang	17 Orang	10 Orang	60 Orang
Persentase		22%	12%	22%	28%	17%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016.

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berumur 18-27 tahun sebanyak 13 Orang (22%), yang berumur 28-37 tahun sebanyak 7 Orang (12%), yang berumur 38 – 47 tahun sebanyak 13 Orang (22%), yang berumur 48-57 tahun sebanyak 17 Orang (28%), dan yang berumur 58 tahun keatas sebanyak 10 Orang (17%).

3. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Untuk identitas responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.3. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Responden	Pekerjaan						Jumlah
		PNS	Pegawai Swasta	TNI/POLRI	Tidak Ada Pekerjaan	Aparatur Desa	Pensiunan	
1.	Pengurus Koperasi	-	-	4 Orang	6 Orang	8 Orang	12 Orang	30 Orang
2.	Pengurus UMKM	-	-	-	13 Orang	6 Orang	11 Orang	30 Orang
Jumlah		-	-	4 Orang	19 Orang	14 Orang	23 Orang	60 Orang
Persentase		-	-	7%	32%	23%	38%	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016.

Berdasarkan tabel diatas tentang identitas responden dilihat dari pekerjaan diketahui bahwa sebanyak 4 Orang (7%) responden memiliki pekerjaan sebagai TNI/POLRI, sebanyak 19 Orang (32%) responden tidak memiliki pekerjaan, sebanyak 14 Orang (23%) responden memiliki pekerjaan sebagai aparatur desa, sebanyak 23 Orang (38%) responden yang pensiunan. Apabila kita melihat pekerjaan pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut, pensiunan dan tidak ada pekerjaan yang paling banyak mengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

B. Analisis Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Strategi pembangunan Kota Pekanbaru merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Pekanbaru. Untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan, maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Pekanbaru maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan di Kota Pekanbaru serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Sejalan hal tersebut, sebagai upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi pembangunan daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

Salah satu strategi pembangunan kota Pekanbaru yang terkait dengan judul penelitian ini adalah meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang tercantum dalam Misi ke-5 No. 2, yaitu meningkatnya peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. Pengembangan kelembagaan koperasi.

Usaha koperasi sangat membutuhkan dukungan pengorganisasian yang baik agar usaha yang dijalankan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Pengembangan kelembagaan koperasi mampu meningkatkan

efektivitas koperasi tersebut. Oleh sebab itu, disini peran pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan kelembagaan koperasi tersebut. Menurut Widiyanti (2007;134), bidang kegiatan usaha ekonomi sangatlah luas, demikian juga jenis kebutuhan ekonomi pada setiap lingkungan ikatan pemersatu, dapat beraneka ragam. Kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mampu dikembangkan dalam hal yang lebih modern, agar kelembagaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat kepercayaan masyarakat dan menarik konsumen yang lebih menguntungkan.

Untuk mengetahui pengembangan kelembagaan koperasi diukur dari penerapan manajemen modern pada koperasi dan penyuluhan koperasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang telah diajukan kuisisioner angket kepada responden dengan hasil sebagai berikut :

Tabel V.4. Tanggapan Responden Terhadap Pengembangan Kelembagaan Koperasi

No.	Kategori Penilaian	Item Yang Dinilai		Jumlah
		Penerapan Manajemen Modern Pada Koperasi	Penyuluhan Koperasi	
1.	Sangat Terlaksana	120	150	270
2.	Terlaksana	72	56	128
3.	Cukup Terlaksana	30	24	54

No.	Kategori Penilaian	Penerapan Manajemen Modern Pada Koperasi	Penyuluhan Koperasi	Jumlah
4.	Kurang Terlaksana	8	16	24
5.	Sangat Tidak Terlaksana	4	-	4
Jumlah		234	246	480
Persentase				80%
Kategori Penilaian				Terlaksana

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang merupakan pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru untuk indikator pengembangan kelembagaan koperasi, yang dinilai pada item pertama yaitu penerapan manajemen modern pada koperasi yang menjawab sangat terlaksana sebanyak 24 responden dengan skor 120, yang menjawab terlaksana sebanyak 18 responden dengan skor 72, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 10 responden dengan skor 30, yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 4 responden dengan skor 8, dan yang menjawab sangat tidak terlaksana sebanyak 4 responden dengan skor 4. Jadi, jumlah skor pada item penerapan manajemen modern pada koperasi adalah $120+72+30+8+4 = 234$.

Pada item kedua yaitu penyuluhan koperasi yang menjawab sangat terlaksana sebanyak 30 responden dengan skor 150, yang menjawab terlaksana sebanyak 14 responden dengan skor 56, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 8 responden dengan skor 24, yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 responden dengan skor 16, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak terlaksana. Jadi, jumlah skor pada item penyuluhan koperasi adalah $150+56+24+16= 246$.

Berdasarkan hasil keseluruhan dari item-item penilaian pada indikator pengembangan kelembagaan koperasi dengan total $234+246 = 480$, pada interval pengukuran kategori sebagai berikut :

Sangat Terlaksana	= 504 - 600
Terlaksana	= 408 - 504
Cukup Terlaksana	= 312 – 408
Kurang Terlaksana	= 216 - 312
Sangat Tidak Terlaksana	= 120 – 216

Jadi, hasil rekapitulasi jawaban responden dari item-item penilaian pada indikator pengembangan kelembagaan koperasi dengan total skor 480 berada pada **408 – 504** dengan persentase 80% yang termasuk pada kategori **Terlaksana**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru menyatakan bahwa

sudah dilaksanakannya penerapan manajemen modern pada koperasi, karena kami selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah berupaya menerapkan kepada koperasi-koperasi suatu sistem komputerisasi yang termasuk didalamnya adalah akuntansi melalui komputer ataupun semua pengelolaan koperasi diterapkan pada sistem komputerisasi. Kemudian untuk penyuluhan koperasi, itu sudah sering dilaksanakan, karena jika kami selaku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diundang dalam kegiatan seminar penyuluhan koperasi tersebut selalu hadir, dan juga ada kegiatan-kegiatan rutin dari Dinas Koperasi, seperti pelatihan manajemen koperasi itu dilakukan setiap tahun. (Wawancara 7 Oktober 2016).

2. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Meskipun koperasi mempunyai misi sosial, namun koperasi harus difungsikan sebagai organisasi ekonomi sebagaimana badan-badan ekonomi lainnya yang bertujuan mencari keuntungan. Oleh karena itu dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus mampu mengembangkan akses pelayanan dan sumber pendanaan yang meliputi sarana atau fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam mendukung operasional usaha, karna hal tersebut memegang peranan penting untuk mencapai hasil usaha yang maksimal, sehingga koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut menjadi berkembang dengan

memberi kesempatan kepada masyarakat miskin untuk bersaing ke level yang lebih tinggi dan menarik konsumen yang lebih menguntungkan.

Untuk mengetahui pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diukur dari fasilitasi permodalan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peningkatan akses permodalan masyarakat miskin, dan pendampingan usaha produktif koperasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini yang telah diajukan kuisioner angket kepada responden dengan hasil sebagai berikut :

Tabel V.5. Tanggapan Responden Terhadap Pengembangan Akses Pelayanan dan Sumber Pendanaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

No.	Kategori Penilaian	Item Yang Dinilai			Jumlah
		Fasilitasi Permodalan Koperasi Dan UMKM	Peningkatan Akses Permodalan Masyarakat Miskin	Pendampingan Usaha Produktif Koperasi	
1.	Sangat Terlaksana	115	110	125	350
2.	Terlaksana	68	76	88	232
3.	Cukup Terlaksana	30	39	21	90

4.	Kurang Terlaksana	20	12	12	44
5.	Sangat Tidak Terlaksana	-	-	-	-
Jumlah		233	237	246	716
Persentase					79,5%
Kategori Penilaian					Terlaksana

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa responden yang merupakan pengurus koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru untuk indikator pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang dinilai pada item pertama yaitu fasilitasi permodalan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjawab sangat terlaksana sebanyak 24 responden dengan skor 115, yang menjawab terlaksana sebanyak 17 responden dengan skor 68, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 10 responden dengan skor 30, yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 responden dengan skor 20, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak terlaksana. Jadi, jumlah skor pada item fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM adalah $115+68+30+20= 233$.

Pada item kedua yaitu peningkatan akses permodalan masyarakat miskin yang menjawab sangat terlaksana sebanyak 22 responden dengan

skor 110, yang menjawab terlaksana sebanyak 19 responden dengan skor 76, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 13 responden dengan skor 39, yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden dengan skor 12, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak terlaksana. Jadi, jumlah skor pada item peningkatan akses permodalan masyarakat miskin adalah $110+76+39+12= 237$.

Pada item ketiga yaitu pendampingan usaha produktif koperasi yang menjawab sangat terlaksana sebanyak 25 responden dengan skor 125, yang menjawab terlaksana sebanyak 22 responden dengan skor 88, yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 responden dengan skor 21, yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 6 responden dengan skor 12, dan tidak ada responden yang menjawab sangat tidak terlaksana. Jadi, jumlah skor pada item pendampingan usaha produktif koperasi adalah $125+88+21+12= 246$.

Berdasarkan hasil keseluruhan dari item-item penilaian pada indikator pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan total $233+237+246 = 716$, pada interval pengukuran kategori sebagai berikut :

Sangat Terlaksana	= 756 - 900
Terlaksana	= 612 - 756
Cukup Terlaksana	= 468 – 612
Kurang Terlaksana	= 324 - 468
Sangat Tidak Terlaksana	= 180 – 324

Jadi, hasil rekapitulasi jawaban responden dari item-item penilaian pada indikator pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan total skor 716 berada pada **612 – 756** dengan persentase 80% yang termasuk pada kategori **Terlaksana**.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru menyatakan bahwa sudah dilaksanakannya memfasilitasi permodalan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), seperti berhubungan atau mencoba menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengumpulkan dana yang sifatnya bantuan langsung untuk masyarakat yang diarahkan untuk koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kemudian untuk peningkatan akses permodalan masyarakat miskin, itu bukan langsung ke masyarakat miskin, tetapi melalui koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini dapat memberdayakan masyarakat miskin, karena anggota atau karyawan dari koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kebanyakan masyarakat miskin. Kemudian untuk pendampingan usaha produktif koperasi, itu sudah dilaksanakan tetapi ada juga yang tidak karena salah satu contoh misalnya dalam bidang usaha perikanan itu otomatis pendampingan usahanya Dinas yang terkait dengan ilmu perikanan, dan Dinas Koperasi hanya melaksanakan seperti pembinaan kelembagaannya. Kemudian bentuk pelayanan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota

Pekanbaru juga menyediakan Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) itu terbuka untuk umum setiap hari Senin – Rabu pada jam 08.00 – 12.00 WIB. (Wawancara 7 Oktober 2016).

Kemudian hasil rekapitulasi jawaban responden dari indikator pengembangan kelembagaan koperasi dan pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tentang strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin kota Pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.6. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Strategi Pembangunan Dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin Kota Pekanbaru Melalui Peningkatan Peran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

No.	Kategori Penilaian	Indikator		Jumlah
		Pengembangan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UKM	
1.	Sangat Terlaksana	270	350	620
2.	Terlaksana	128	232	360
3.	Cukup Terlaksana	54	90	144

4.	Kurang Terlaksana	24	44	68
5.	Sangat Tidak Terlaksana	4	-	4
	Pengembangan Kelembagaan Koperasi	Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UKM	Jumlah	
	Jumlah	480	716	1196
	Persentase	80%	79,5%	79,7%
	Kategori	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian, 2016.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dari seluruh jawaban responden pada tabel diatas, rekapitulasi jawaban responden tentang strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin Kota Pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada indikator :

1. Pengembangan Kelembagaan Koperasi.

Semua item penilaian yang telah dijumlahkan pada kategori Sangat Terlaksana (ST) dengan skor 270, pada kategori Terlaksana (T) dengan skor 128, pada kategori Cukup Terlaksana (CT) dengan skor 54, pada kategori Kurang Terlaksana (KT) dengan skor 24, dan pada kategori Sangat Tidak Terlaksana (STT) dengan skor 4. Dengan jumlah **480**,

indikator pengembangan kelembagaan koperasi berada pada Range Skor antara **408 – 504** termasuk pada kategori **”Terlaksana”**.

2. Pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UKM.

Semua item penilaian yang telah dijumlahkan pada kategori Sangat Terlaksana (ST) dengan skor 350, pada kategori Terlaksana (T) dengan skor 232, pada kategori Cukup Terlaksana (CT) dengan skor 90, pada kategori Kurang Terlaksana (KT) dengan skor 44, dan pada kategori Sangat Tidak Terlaksana (STT) tidak ada. Dengan jumlah **716**, indikator pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan UKM berada pada Range Skor antara **612 – 756** termasuk pada kategori **”Terlaksana”**.

Berdasarkan hasil rekapitulasi jawaban responden tentang strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin Kota Pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan total skor $480+716 = \mathbf{1196}$, pada interval pengukuran kategori sebagai berikut :

Sangat Terlaksana	= 1260 - 1500
Terlaksana	= 1020 - 1260
Cukup Terlaksana	= 780 – 1020
Kurang Terlaksana	= 540 - 780
Sangat Tidak Terlaksana	= 300 – 540

Jadi, hasil rekapitulasi jawaban responden tentang strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin Kota Pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan total skor **1196** berada pada **1020 - 1260** dengan **79,7%** termasuk pada kategori “**Terlaksana**”.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sesuai dengan tabel rekapitulasi jawaban responden tentang strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin kota Pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), indikator pengembangan kelembagaan koperasi dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab kategori Sangat Terlaksana (ST) dengan skor 270, dengan alasan Dinas Koperasi rutin melaksanakan penyuluhan dan seminar, kemudian penerapan manajemen modern juga sangat terlaksana, tetapi anggota atau Sumber Daya Manusia (SDM) dari koperasi tersebut belum mampu. Responden yang menjawab kategori Terlaksana (T) dengan skor 128, dengan alasan anggota atau Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi kurang mendapat perhatian kemampuan modernisasi. Responden yang menjawab kategori Cukup Terlaksana (CT) dengan skor 54, dengan alasan Dinas Koperasi hanya sekedar melakukan penyuluhan tidak sepenuh hati. Responden yang menjawab kategori Kurang Terlaksana (KT) dengan skor 24, dengan alasan sulitnya memahami penyuluhan koperasi. Responden yang menjawab kategori Sangat Tidak Terlaksana (STT) dengan skor 4, dengan alasan sulitnya berhubungan dengan Dinas yang terkait. Jadi, total keseluruhan dari kategori penilaian terhadap indikator pengembangan

kelembagaan koperasi yang telah sesuai dengan prosedur adalah 480 yang berada pada range skor antara 408-504 termasuk pada kategori “Terlaksana”.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang sesuai dengan tabel rekapitulasi jawaban responden tentang strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin kota Pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), indikator pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat disimpulkan bahwa responden yang menjawab kategori Sangat Terlaksana (ST) dengan skor 350, dengan alasan permodalan dan pendampingan sudah sangat dibantu oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Responden yang menjawab kategori Terlaksana (T) dengan skor 232, dengan alasan fasilitasi permodalan masih belum cukup. Responden yang menjawab kategori Cukup Terlaksana (CT) dengan skor 90, dengan alasan pendampingan usaha produktif tersebut merasa kurang diperhatikan. Responden yang menjawab kategori Kurang Terlaksana (KT) dengan skor 44, dengan alasan akses permodalan masyarakat miskin tidak mengalami peningkatan dan masyarakat miskin di dalam koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu pendataan dan diperhatikan. Responden yang menjawab kategori Sangat Tidak Terlaksana (STT) tidak ada. Jadi, total keseluruhan dari kategori penilaian terhadap indikator pengembangan akses pelayanan dan sumber pendanaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah sesuai prosedur adalah 716 yang berada pada range skor antara 612-756 termasuk pada kategori “Terlaksana”.

Berdasarkan hasil dari tabel rekapitulasi jawaban responden tentang strategi pembangunan dalam memberdayakan masyarakat miskin kota pekanbaru melalui peningkatan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), jadi total keseluruhan dari item penilaian dengan total skor $480 + 716 = 1196$ berada pada range skor 1020 – 1260 dengan persentase 79,7% termasuk pada kategori “Terlaksana”.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran – saran dalam penelitian ini berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Untuk lebih meningkatkan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan permodalan masyarakat miskin, maka sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat lebih banyak menjalin kerja sama ke perusahaan swasta dalam hal kemitraan usaha dengan mengumpulkan dana yang bersifat bantuan langsung kepada masyarakat miskin melalui usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk lebih meningkatkan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pendampingan usaha, maka sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih rutin melaksanakan program pelatihan dan pembinaan bersama Dinas terkait yang sesuai kebutuhan usaha dari koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut.

3. Untuk lebih meningkatkan peran koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam penyuluhan koperasi, maka sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih rutin melaksanakan program seminar ataupun pameran bersama Dinas terkait agar masyarakat dapat lebih memahami arti koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Dengan banyaknya anggota atau Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang lemah dan kurang mengenal teknologi sistem komputerisasi modern, maka sebaiknya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lebih rutin melaksanakan pelatihan sistem komputerisasi dengan Dinas terkait dan pengarahan terkait pembinaan manajemen modern dalam usaha koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Admosudiardjo, S. Prajudi, 1997. *Dasar-dasar Administrasi*, Jakarta: Galia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi, 2006. *Metode Penelitian*. Yogyakarta, Bina Aksara.
- Bagong, Suyanto dan Sutinah (Editor), 2006. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Kencana, Jakarta.
- Brantas, 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, CV. Alfabeta, Jakarta.
- Hamim, Sufian. 2005. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Press.
- Hamim, Sufian dan Indra, Muchlis, Adnan, 2005. *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen: Suatu Ilmu, Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Tanpa Nama Penerbit, Pekanbaru.
- Hariandja, Effendi, Tua Marihot. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Grasindo.
- Kartasapoetra. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Sabardi, Agus. 2001. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta, Akademi Manajemen.
- Safwanor, Mei 2011. Bogor. Buku Penelitian.
- Saydam, Gouzali. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Djambatan.
- Siagian, Sondang,P. 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta : Rineka Cipta
- Siagian, Sondang, P. 2002. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta : Rineka Cipta.

- Siagian, Sondang, P. 2003. *Filsafat Administrasi : edisi revisi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Pusat Bahasa Depdiknas.
- Sugiyono, 2006. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Bandung, CV. ALFABETA.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Suminta, Praja, 2005. *Administrasi Pembangunan*. Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Terry, R, George. 2000. *Prinsip – Prinsip Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2008. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widiyanti, Ninik. 2010. *Manajemen Koperasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Zulkifli. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Pekanbaru: UIR PRESS.
- Zulkifli, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa : Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru : Fisipol UIR.

Dokumentasi :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru

Tahun 2012 – 2017 dan Termasuk Visi Misi Kota Pekanbaru 2012 – 2017.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau